



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6206);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6322);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya ;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 450);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 63);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar – Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18

- Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 381), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 19);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 17);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 15);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a Pendapatan	Rp2.776.498.025.041,00	
b Belanja	<u>Rp2.795.800.003.283,00</u>	
Defisit		Rp(19.301.978.242,00)
c Pembiayaan		
Penerimaan	Rp54.604.199.504,00	
Pengeluaran	<u>Rp3.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp51.604.199.504,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 119.374.332.916,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.895.872.357.957,00
 - b Realisasi Rp2.776.498.025.041,00
 - Selisih kurang Rp119.374.332.916,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp152.215.554.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

a	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.948.015.557.461,00
b	Realisasi	<u>Rp2.795.800.003.283,00</u>
	Selisih kurang	Rp152.215.554.178,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (32.841.221.262,00) dengan rincian sebagai berikut:

a	Surplus setelah perubahan	Rp(52.143.199.504,00)
b	Surplus realisasi	<u>Rp(19.301.978.242,00)</u>
	Selisih kurang	Rp(32.841.221.262,00)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp539.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a	Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp55.143.199.504,00
b	Realisasi	<u>Rp54.604.199.504,00</u>
	Selisih kurang	Rp539.000.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00
b	Realisasi	<u>Rp3.000.000.000,00</u>
	Selisih kurang	Rp0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp539.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp52.143.199.504,00
b	Realisasi	<u>Rp51.604.199.504,00</u>
	Selisih Kurang	Rp539.000.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a	Saldo anggaran lebih awal tahun sebelumnya	Rp54.604.199.504,00
b	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya	Rp54.604.199.504,00
c	Sisa lebih (kurang) Pembiayaan Anggaran (Silpa/SIKPA)	Rp32.302.221.262,00
d	Saldo anggaran lebih akhir	Rp32.302.221.262,00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a	Jumlah Pendapatan L-O	Rp2.485.747.112.181,27
b	Jumlah Beban	Rp2.321.051.063.161,37
c	Surplus L-O	Rp164.696.049.019,90

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a	Ekuitas awal	Rp2.356.786.307.214,21
b	Surplus L-O	Rp164.696.049.019,90
c	Dampak kumulatif perubahankebijakan	Rp87.030.712.623,30
d	Ekuitas	Rp2.608.513.068.857,41

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a	Jumlah Asset	Rp2.649.173.155.270,54
b	Jumlah Kewajiban	Rp <u>40.660.086.413,14</u>
c	Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.608.513.068.857,41

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp54.604.199.504,00
b	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp358.480.430.138,00
c	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(380.782.408.380,00)
d	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f	Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp32.302.221.262,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a Lampiran I : laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah

- dan organisasi;
- Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c Lampiran III : laporan operasional;
- d Lampiran IV : LPE;
- e Lampiran V : neraca;
- f Lampiran VI : laporan arus kas;
- g Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal: 24 - 8 - 2021



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal: 24 - 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUP. ATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT (4/114/2021)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID		19/8	
KA BID			
SEKRETARIS			
KE PALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	2855.872.357,00	2784.498.000,00	95,88	3120.839.676,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA	330.335.348,00	298.226.080,62	90,43	301.403.357,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah -LRA	80.865.500,00	80.174.475,24	104,27	93.712.785,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	59.239.831.607,00	58.993.035.553,00	99,37	59.325.349.744,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6.853.805.486,00	6.838.121.196,00	100,00	5.689.371.180,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah -LRA	183.376.212.218,00	154.025.627,00	83,99	151.676.426.363,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER -LRA	2.428.369.190.648,00	2.341.084.503,00	96,43	2.313.957.882.980,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana	1.694.335.694.409,00	1.650.118.409,00	97,39	1.740.991.070.659,00
1.2.1.0	Bagi Hasil Pajak-LRA	56.770.899.080,00	49.050.810,00	83,71	31.292.653.954,00
1.2.1.0	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LRA	52.821.356.329,00	38.686.836.474,00	73,24	2.417.735.308,00
1.2.1.0	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	1136.000.000,00	1.112.209.015.000,00	98,78	1.243.359.240.000,00
1.2.1.0	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	125.809,00	12.191.326.528,00	97,13	112.809.072.411,00
1.2.1.0	Dana Alokasi Khusus Bantuan	323.343.000,00	31.389.573.355,00	98,93	329.938.868.986,00
1.2.1.0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya -LRA	350.969.000,00	350.969.050.000,00	100,00	329.482.000.000,00
1.2.2.0	Dana Penyesuaian	35.096.000,00	350.969.050.000,00	100,00	329.482.000.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -	148.765.387.350,00	120.497.630.679,00	81,00	124.287.626.143,00
1.2.3.0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi)	148.765.387.353,00	120.497.630.679,00	81,00	124.287.626.143,00
1.2.4	Bantuan Keuangan -LRA	234.299.063.884,00	220.035.555.207,00	93,91	119.207.186.178,00
1.2.4.0	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	234.299.063.884,00	220.035.555.207,00	93,91	119.207.186.178,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LRA	137.167.816.000,00	136.151.299.359,00	99,26	705.467.878.355,00
1.3.1	Pendapatan lain-lain yang sah -LRA	137.167.816.000,00	136.151.299.359,00	99,26	132.491.066.034,00
2	BELANJA	2.341.430.774.781,00	2.341.430.774.781,00	93,91	2.198.502.752.623,00
2.1	BELANJA OPERASI	2.025.658.322.282,00	1.909.824.149.985,00	94,28	1.944.737.838.238,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.233.111.157,00	1.198.140.805,00	97,16	1.258.919.410.271,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	699.993.735.873,00	630.797.764.199,00	90,11	621.137.086.496,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	56.395.837,00
2.1.5	Belanja Hibah	53.290.500.000,00	53.895.164.000,00	95,51	46.758.411.134,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	392.627.702.694,00	2.199.041.673,00	76,38	1.712.397.000,00
2.2	BELANJA MODAL	413.868.631.198,00	371.170.376.805,00	90,00	251.909.012.385,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5770.000.000,00	473.298.296,00	82,03	2.116.899.880,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.932.667.602,00	173.573.821.550,00	95,55	69.505.690.284,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.295.309.823,00	112.473.642.588,00	88,36	68.482.403.228,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.470.653.299,00	43.926.659.308,00	94,63	63.102.151.929,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.041.378.444,00	36.587.409.608,00	81,23	44.512.883.667,00
2.2.6	Pengadaan Aset lainnya	1.409.850.000,00	1.409.244.455,00	99,96	418.339.397,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	53.804.073.068,00	52.902.857.991,00	98,33	1.855.902.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	53.804.073.068,00	52.902.857.991,00	98,33	1.855.902.000,00
3	TRANSFER	454.684.525.813,00	454.682.800,00	99,93	452.111.105.440,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	14.403.811.713,00	14.370.648,00	99,77	13.380.547.395,00
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9371.276.739,00	9.342.354,00	99,70	8.783.799.145,00
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	5032.534.974,00	5.027.293,00	99,91	4.496.748.250,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANG	440.280.714.100,00	439.998.579.463,00	99,94	438.830.558.045,00
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	439.267.547.100,00	438.985.412.463,00	99,94	437.876.738.945,00
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Lainnya	1.013.167.000,00	1.013.167.000,00	100,00	953.819.100,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT	2.948.015.557.461,00	2.795.800.003.283,00	94,84	2.650.613.858.063,00
4	PEMBIAYAAN	52.143.199.504,00	51.604.199.504,00	98,97	42.644.806.119,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.143.199.504,00	54.604.199.504,00	99,02	49.683.696.301,00
4.1.1	Penggunaan SILPA	55.143.199.504,00	54.604.199.504,00	100,00	34.423.696.301,00
4.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	539.000,00	-	-	15.000.000.000,00
4.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	2.600.000.000,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	92.328.502.420,00
4.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	350.000.000,00
4.2.3	Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam	-	-	-	82.598.352.420,00
4.2.7	Negeri Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	6.230.150.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.143.199.504,00	51.604.199.504,00	98,97	42.644.806.119,00
	SEA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	32.302.321.262,00	-	54.604.199.504,00


 BUPATI KUNINGAN
 ACEP PURNAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID		19/8	
KASIBD			
SEKRETARIS			
KEPALA BIDAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			






PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI(PNS & CPNS) PER-GOLONGAN DAN PER-JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL TERTEUTU	FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	7	8	9
Golongan IVe					2		2
Golongan IVd		1			6		7
Golongan IVc		21			192		213
Golongan IVb		9	55	1	2.214	3	2.282
Golongan IVa		2	97	67	938	9	1.113
JUMLAH GOLONGAN IV	-	33	152	68	3.352	12	3.617
Golongan III/d			34	407	1.298	155	1.894
Golongan III/c				228	1.136	355	1.719
Golongan III/b				46	863	695	1.504
Golongan III/a				1	275	306	582
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	34	682	3.572	1.411	5.699
Golongan II/d					86	359	445
Golongan II/c					165	437	602
Golongan II/b					9	176	185
Golongan II/a					26	33	59
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	286	1.005	1.291
Golongan I/d						38	38
Golongan I/c						9	9
Golongan I/b						4	4
Golongan I/a						-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	51	51
TOTAL	-	33	186	750	7.210	2.479	10.658


BUPATI KUNINGAN

CEP PURNAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUB-AG / KASUB-BID		19/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BUL.			
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGGAH
DAFTAR BEKANTUKSI PUTANG DIBAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

LAHIRAN VII

No	Uraian Beban Putang	Tahun Pengakuan Putang	Saldo Awal Putang	Penambahan Putang	Pengurangan Putang	Saldo Akhir Putang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
II. PUTANG RETRIBUSI :						
1	Retribusi Sewa Tanah	2011 S/D 2020	15.859.528.897,00	30.588.804.678,00	37.839.499.501,00	8.608.914.074,00
2	Retribusi Pengendalian Mekanis Telekomunikasi	2020	27.699.723,00	223.095.416,00	212.501.312,00	38.283.827,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2015 S/D 2020	15.831.659.124,00	90.212.815.282,00	37.626.948.185,00	8.417.526.247,00
III. PUTANG LAIN-LAIN PAID YANG SAH						
1	Putang Denda Pajak	2013 S/D 2020	24.941.307.874,91	70.914.779.150,00	82.679.640.396,91	13.284.446.628,00
2	Putang Denda Retribusi Daerah	2013 S/D 2020	239.494.687,00	121.373.058,00	122.385.940,00	238.481.805,00
3	Putang dari Pengembangan	2020	6.803.456,00	201.093,00	201.093,00	6.803.456,00
4	Putang BLUD	2007 S/D 2020	72.943.900,00	107.005.795,00	46.321.895,00	133.627.800,00
5	Putang Kompetensi Peminatan Sumber Daya Air	2020	24.421.340.438,00	70.224.166.714,00	81.880.439.455,00	12.814.967.697,00
6	Putang TGR	2009 S/D 2020	106.344.829,00	416.032.480,00	331.811.048,00	300.565.870,00
			94.480.565,91	-	94.480.565,91	-
IV. Putang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan						
		2016, 2019 dan 2020	1.856.100.667,00	544.825.235.635,00	38.016.303.545,00	24.077.692.157,00
V. Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: Persepsi						
		2020	5.031.512.489,00	6.213.273.670,00	5.031.512.489,00	4.211.774.670,00
Va. Saldo Lencar Tertunda Kawalangan						
		2009 S/D 2020	94.480.565,91	351.297.489,38	5.300.000,00	447.478.059,00
Vii. Putang Lainnya						
		2013 S/D 2020	444.562.484,09	94.480.565,91	-	539.043.000,00
	Jumlah		62.791.711.148,91	248.025.182.144,09	247.685.081.539,91	66.003.143.150,09



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM
 PEJABAT PARAF TGL. KET.
 KASUB BAG.
 KABAG.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH
 WAKIL SGL
 KAS. BID
 KATID
 SEKRETARIS
 KEPALA BANTUAN
 ASISTEN
 SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran IX PERATURAN DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

Nomor	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
	2	3	4	5	6
I.	Piutang Pajak	2020	15.633.793,562,00	9.186.333.691,76	6.447.459.870,24
II.	Piutang Retribusi	2020	8.608.914.074,00	4.178.468.801,86	4.430.445.272,15
III.	Piutang Lain-lain PAD yang sah	2020	13.384.446.628,00	2.425.761.508,51	10.958.685.119,50
IV.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2020	24.077.692.157,00	3.382.495.775,00	20.695.196.382,00
V.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi	2020	4.211.773.670,00	0,00	4.211.773.670,00
VI.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	2020	447.478.059,09	210.729.923,41	236.748.135,68
VII.	Piutang Lainnya	2020	539.043.000,00	539.043.000,00	-
	JUMLAH		66.903.141.150,09	19.922.832.700,53	46.980.308.449,56

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID		19/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SEB.BAG.			
KABAS.			


ACEP PURNAMA
 BUPATI KUNINGAN

KABUPATEN KUNINGAN
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran X PERATURAN DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

No	Uraian	Tahun Pengakuan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6 a.d. - g.
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
JUMLAH					

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
WALILAYAH	<i>[Signature]</i>	19/6	
KASUBID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
PIWALIA BUDAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		


 BUPATI KUNINGAN
[Signature]
 ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : _____
TANGGAL : _____

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk penyertaan modal (Investasi) daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah modal yang telah disartakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disartakan sampai akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disartakan	Hasil penyertaan modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disartakan sampai dengan tahun ini
								9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	1973 / 1974	BANK KUNINGAN	Perda no. 2 Tahun 2015 tlg perubahan ke-dua Perda No. 5 Thn 2008	Investasi	50.000.000,000	19.382.446.303	-	19.382.446.303	30.617.553.697	2.201.751.616	-	19.382.446.303
2	2015	PT. LKM KUNINGAN	Perda Nomor 20 Tahun 2015	Investasi	3.000.000.000	2.774.684.241	-	2.774.684.241	225.315.759	(195.513.003)	-	2.774.684.241
4	1989 / 1990	PDAM TIRTA KAMUNING	2011 tlg perb. Kedua atas perda no.18 2008 tlg <small>nonvestasi</small>	Investasi	73.051.456.067	65.476.616.832	3.000.000.000	68.476.616.832	4.574.839.235	3.527.028.269	-	68.476.616.832
5	2010	PDAU DARMA PUTRA KERTARAHAJA	2011 tlg perb. Kedua atas perda no. 18 2008 tlg <small>nonvestasi</small>	Investasi	20.035.000.000	5.500.000.000	-	5.500.000.000	14.535.000.000	24.776.464	-	5.500.000.000
6	1981 / 1982	BANK JABAR	Perda Nomor 4 Tahun 2008	Investasi	6.877.000.000	9.326.111.000	-	9.326.111.000	(2.449.111.000)	2.757.035.311	-	9.326.111.000
Jumlah					152.963.456.067	102.459.858.376	3.000.000.000	105.459.858.376	47.503.997.691	8.315.078.657	-	105.459.858.376

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBIBD		19/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KETPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBSAG.			
KASAG.			

BUPATI KUNINGAN

ACEP URUWAMA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

KABUPATEN KUNINGAN
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Saldo Awal 2019	Mutasi		Saldo Akhir 2020
			Bertambah	Berkurang	
1		3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	658.596.500,113,00	27.003.243.612,66	7.005.977.883,33	678.593.765.842,33
2	Peralatan dan Mesin	491.659.698.607,11	249.440.993.923,82	25.830.498.357,61	715.270.194.173,32
3	Gedung dan Bangunan	1.269.847.220.777,21	139.026.474.570,34	92.116.818.477,57	1.316.756.876.869,98
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	1.951.322.021.118,60	177.782.944.801,45	5.286.363.281,87	2.123.818.602.638,18
5	Aset tetap lainnya	69.943.679.804,90	39.643.863.675,68	35.147.299.140,10	74.440.244.340,48
6	Konstruksi dalam pengerjaan	20.651.814.000,00	10.916.721.750,00	-	31.568.535.750,00
	Jumlah Aset Tetap	4.462.020.934.420,82	643.814.242.333,95	165.386.957.140,48	4.940.448.219.614,29
7	Akumulasi Penyusutan	(2.321.868.029.058,06)	(229.323.027.268,66)	(29.208.399.517,59)	(2.521.982.656.809,13)
	Jumlah	2.140.152.905.362,75	414.491.215.065,29	136.178.557.622,89	2.418.465.562.805,16

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBID	<i>[Signature]</i>	19/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KETPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.			

BUPATI KUNINGAN
[Signature]
 ACEP PURNAMA

KABUPATEN KUINGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TERAP
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XIII
PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

No	SKPD	Teach	Peralatan dan Meletri	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	176.438.341.400,00	263.190.216.929,00	778.453.015.699,23	481.888.800,00	65.116.424.708,19	-	1.283.679.886.736,42
2	DINAS KESEHATAN	11.390.542.043,00	63.528.915.190,00	121.719.562.286,67	30.400.000,00	623.000,00	-	196.670.042.519,67
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45	14.478.896.000,00	110.182.714.943,00	15.147.631.057,00	5.584.000.000,00	-	-	145.393.243.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGALATI	-	77.432.628.782,00	34.264.545.850,00	1.815.966.121,00	-	-	113.513.142.753,00
5	DINAS PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	153.964.507.340,00	12.153.989.953,00	30.492.116.712,55	2.097.511.452.140,58	2.624.659.500,00	30.472.086.000,00	2.327.218.816.651,13
6	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	18.366.109.348,00	2.042.269.829,00	3.836.665.950,00	394.789.000,00	684.154.000,00	-	25.324.148.122,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PIRAI (SATPOL PP)	-	3.623.092.706,00	4.254.022.200,00	-	388.020.500,00	-	8.265.135.406,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERILINDUNGAN ANAK	185.200.000,00	1.158.534.100,00	3.069.959.000,00	25.157.000,00	-	-	4.478.850.100,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	47.500.000,00	4.002.370.953,00	7.652.463.139,00	98.169.000,00	-	-	11.800.503.092,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.316.492.901,00	6.806.202.787,00	11.743.299.239,00	3.224.595.500,00	-	-	28.090.590.827,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49.424.131.619,00	14.825.435.510,00	61.887.386.116,49	7.661.349.886,00	819.886.000,00	-	134.617.389.131,49
12	DINAS KEPENDUDIKAN DAN PENCAHTAAN SIPIL	-	5.941.095.649,00	3.261.513.450,00	-	2.700.000,00	-	9.205.309.099,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1.809.641.736,00	1.655.474.000,00	-	-	-	3.465.115.736,00
14	PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN PERILINDUNGAN ANAK	-	9.112.782.494,00	9.762.841.363,00	-	500.000,00	-	18.876.123.857,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	29.338.662.036,00	15.390.364.699,54	1.648.296.001,00	6.000.000,00	-	46.383.322.736,54
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	183.876.000,00	5.004.390.942,00	2.169.747.100,00	-	-	-	7.358.014.042,00
17	PERINDUSTRIAN	23.870.000,00	5.974.794.865,00	39.627.763.668,00	641.406.000,00	55.350.000,00	-	45.881.778.533,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	4.478.815.860,00	6.060.449.250,00	-	-	-	11.180.671.110,00
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA	-	2.483.169.048,00	20.404.444.299,60	199.290.000,00	1.003.392.749,29	-	24.090.296.096,89
20	DINAS KEKAMPUNAN DAN PERUSTAKAAN	248.300.000,00	2.937.161.898,00	3.153.891.000,00	-	800.409.464,50	-	7.139.762.362,50
21	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	23.750.000,00	3.932.153.598,00	10.262.646.701,00	1.736.791.290,00	-	-	15.955.341.589,00
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	21.426.666,00	2.270.731.097,00	1.918.842.000,00	-	33.408.000,00	-	4.244.407.763,00
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1.086.300.000,00	2.937.902.331,00	1.666.666.250,00	26.146.000,00	21.250.000,00	-	5.738.264.581,00
25	BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	-	4.893.574.126,00	3.003.833.211,00	-	-	-	7.897.407.337,00
26	BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	-	4.505.678.402,00	6.220.390.750,00	-	46.500.000,00	-	8.890.015.618,00
27	BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	-	2.623.122.868,00	31.551.538.300,00	1.194.109.300,00	184.988.772,50	-	68.504.634.145,50
28	SEKRETARIAT DAERAH	12.143.549.399,00	23.430.488.374,00	4.690.645.100,00	-	1.136.135.500,00	-	15.618.849.905,00
29	SEKRETARIAT DPRD	-	9.792.009.305,00	-	-	-	-	-
30	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
31	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	4.415.294.592,00	1.528.718.750,00	(0,40)	-	-	5.944.013.341,60
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.426.715.246,00	956.725.000,00	-	99.650.000,00	-	2.483.090.246,00
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	835.822.996,00	2.683.406.000,00	-	-	-	4.695.228.996,00
34	KECAMATAN CIWANGBANG	1.176.000.000,00	767.162.534,00	1.255.458.500,00	-	-	-	2.022.621.034,00
35	KECAMATAN CIRIBENI	-	612.820.976,00	530.339.000,00	-	-	-	1.143.159.976,00
36	KECAMATAN CIDAHU	-	525.647.875,00	1.383.366.200,00	-	-	-	1.909.014.075,00
37	KECAMATAN GIGANDAMEKARI	-	881.455.390,00	2.289.936.789,00	-	-	-	3.171.392.179,00
38	KECAMATAN ILIMUS	-	557.765.790,00	1.944.569.500,00	-	-	-	2.757.841.613,00
39	KECAMATAN CIWABU	255.506.323,00	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Meubel	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
40	KECAMATAN DARMA	-	635.855.910,00	1.434.515.500,00	-	-	-	2.070.371.410,00
41	KECAMATAN GARAWANGI	-	871.077.330,00	947.394.160,00	-	-	-	1.818.471.490,00
42	KECAMATAN JALAKSANA	1.222.800.000,00	750.638.950,00	1.233.388.000,00	-	-	-	3.206.826.950,00
43	KECAMATAN KADUGEDE	-	585.722.450,00	1.366.139.000,00	-	-	-	1.951.861.450,00
44	KECAMATAN KARANGKACANA	-	569.116.280,00	1.160.231.293,00	-	-	-	1.729.353.583,00
45	KECAMATAN KRAMATMULYA	-	780.857.950,00	1.463.410.000,00	-	-	-	2.244.267.950,00
46	KECAMATAN KUNINGAN	16.198.565.592,00	3.509.155.250,00	18.504.856.481,00	1.358.022.000,00	21.518.868,00	-	39.592.118.149,00
47	KECAMATAN LEBAKWANGI	-	712.083.476,00	414.554.000,00	-	-	-	1.126.637.476,00
48	KECAMATAN LURAGUNG	774.130.000,00	722.612.930,00	860.519.667,00	-	-	-	2.357.262.597,00
49	KECAMATAN MALEER	-	771.798.036,00	1.440.484.453,00	-	-	-	2.214.282.489,00
50	KECAMATAN MANDIRANCAN	-	650.932.950,00	1.537.306.500,00	-	-	-	2.188.239.450,00
51	KECAMATAN PANCALANG	116.600.000,00	650.254.392,00	1.086.472.500,00	-	-	-	1.942.633.892,00
52	KECAMATAN SINDANGGUNG	-	541.812.950,00	1.290.456.000,00	89.307.000,00	-	-	1.832.268.950,00
53	KECAMATAN CIBUREUM	-	568.078.300,00	1.647.227.393,00	-	-	-	2.215.305.693,00
54	KECAMATAN CIGUGUR	3.495.253.490,00	1.804.980.440,00	6.187.497.685,00	-	-	-	11.487.731.615,00
55	KECAMATAN CILEBAK	-	629.408.878,00	3.216.189.000,00	-	-	-	3.847.597.878,00
56	KECAMATAN CIMAH	-	576.197.236,00	961.825.000,00	-	-	-	1.538.022.236,00
57	KECAMATAN CINCIRU	-	464.079.450,00	1.180.231.000,00	-	-	-	1.644.310.450,00
58	KECAMATAN CIPICUNG	-	564.416.586,00	879.194.500,00	-	-	-	1.443.611.086,00
59	KECAMATAN HANTARA	-	591.166.450,00	1.099.383.000,00	-	-	-	1.690.549.450,00
60	KECAMATAN JAPARA	-	490.205.590,00	1.003.151.000,00	-	-	-	1.493.356.590,00
61	KECAMATAN KALIMANGGIS	-	497.338.290,40	942.907.633,00	-	-	-	1.440.245.923,40
62	KECAMATAN KULMANGGIS	-	451.885.450,00	625.399.000,00	-	-	-	1.077.284.450,00
63	KECAMATAN PASAWAHAN	-	624.601.098,00	1.399.705.793,00	-	-	-	2.024.306.891,00
64	KECAMATAN SELAJAMBE	-	588.524.437,50	1.226.094.773,00	-	-	-	1.814.619.210,50
65	KECAMATAN SUBANG	33.007.280,00	593.025.584,00	2.290.972.323,00	-	-	-	2.917.005.107,00
66	SKPKD	210.979.140.521,00	4.599.175.852,00	15.458.927.079,50	97.500.000,00	1.395.413.278,00	1.096.449.750,00	233.626.606.880,90
67	JUMLAH	678.593.765.842,00	715.270.194.173,90	1.316.756.876.889,98	2.123.818.602.695,18	74.440.244.340,48	31.568.535.750,00	4.940.448.210.614,54

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASURBID		19/8	
KARID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XIV

PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

No	Uraian	Saldo Awal 2019	MUTASI		Saldo Akhir 2020
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30.472.086.000,00	-	-	30.472.086.000,00
2,00	SKPKD (Pembangunan RS Rujukan Cibingbin	30.472.086.000,00	1.096.449.750,00	-	1.096.449.750,00
		30.472.086.000,00	-	-	30.472.086.000,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID	<i>[Signature]</i>	11/8	
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRE TARIS			
KET. PALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		


BUPATI KUNINGAN
[Signature]
ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

No	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
					6-344-5
1	Kembaraan Dengan Pihak Ketiga	-	10.073.344.000,10	-	10.073.344.000,10
I	SRKPD	-	10.073.344.000,10	-	10.073.344.000,10
II	Aset Tak Berwujud	8.337.104.837,00	2.102.528.205,00	916.708.984,00	9.522.923.858,00
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.867.457.722,00	1.328.980.000,00	912.953.529,00	4.047.391.251,00
2	DINAS KESEHATAN	1.091.752.400,00	-	-	1.091.752.400,00
3	RUMAH SAKIT LUMUM DAERAH /45	750.637.500,00	-	-	750.637.500,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	143.556.800,00	-	-	143.556.800,00
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.480.000,00	-	-	6.480.000,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	213.238.000,00	-	-	213.238.000,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	437.251.000,00	45.000.000,00	-	482.251.000,00
8	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA	-	36.509.000,00	-	36.509.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	81.103.470,00	10.060.000,00	-	91.163.470,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	235.479.000,00	131.698.000,00	-	367.168.000,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	97.485.000,00	-	-	97.485.000,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	107.054.000,00	-	-	107.054.000,00
13	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARWISATA	-	54.186.000,00	-	54.186.000,00
14	DINAS KEASIPAN DAN PERPUSTAKAAN	39.820.000,00	21.924.000,00	-	61.744.000,00
15	DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	790.216.045,00	223.511.205,00	3.755.455,00	1.017.483.105,00
16	BADAN PENGELOLAAN PENDAFT DAERAH	465.905.000,00	-	-	465.905.000,00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.807.957.300,00	74.360.000,00	-	1.882.317.300,00
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUM	215.520.000,00	-	-	215.520.000,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	6.500.000,00	136.800.000,00	-	143.300.000,00
20	SEKRETARIAT DPRD	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00
21	BADAN KESETIAUAN BANGSA DAN POLITIK	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00
22	KECAMATAN KRAMATMULYA	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
III	Aset lain-lain	51.441.311.169,046	13.855.217.419,87	19.757.253.688,37	45.539.274.899,57
IV	Akumulasi Penurunan Aset Lainnya	(39.928.689.838,98)	(11.305.276.952,41)	(15.682.746.132,02)	(35.551.220.659,37)
	Jumlah	19.948.725.965,08	14.725.812.672,56	4.991.216.540,35	29.584.322.093,29



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUB.BAG / KASUB.BID		19/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XVII

PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Nomor	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	89.655.539,00	1.049.767.803,06	89.655.539,00	1.049.767.803,06
2	Pendapatan Diterima Dimuka	6.236.195.570,92	2.024.823.067,42	4.503.790.580,26	3.757.228.058,08
3	Utang Belanja	814.924.032,00	762.053.627,00	814.924.032,00	762.053.627,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.549.215.711,00	57.368.101.070,00	41.826.279.856,00	35.091.036.925,00
	JUMLAH	26.689.990.852,92	61.204.745.567,48	47.234.650.007,26	40.660.086.413,14

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TANGGAL
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>	19/6
KABID		
SEKRETARIS		
KEPALA BADAN		
ASISTEN		
SEKRETARIS DAERAH		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	PARAF	TGL.
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>	
KABAG.		



KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XVIII

PERATURAN DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL :

Nomor	Uraian	Saldo Awal	Pertambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBDAG/ KASUBDAG	<i>[Signature]</i>	19/8	
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			


BUPATI KUNINGAN
[Signature]
ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGAN
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XIX: PERATURAN DAERAH
 NOMOR: _____
 TANGGAL: _____

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018				Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun 2018	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
Jumlah								

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEJABAT	PARAF	TANGGAL	K. T.
KASUBAG / KASUBID		9/8	
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

BUPATI KUNINGAN


 ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			

KABUPATEN KUNINGAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XX

PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

Nomor	BUMD	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
1	PD BPR	215.670.015.872,00	186.892.647.941,00	28.777.367.931,00	35.126.075.473,00	33.177.572.093,00
2	PT.LKM. Kuningan	9.136.165.860,00	5.986.360.059,00	3.149.805.801,00	1.497.557.148,00	1.683.556.160,00
3	PDAM Anya Kamuning	73.559.310.438,00	7.915.573.745,00	65.643.736.693,00	55.214.491.495,00	51.263.387.297,00
4	PDAU Darma Putra Kertaraharja	5.538.133.750,00	92.139.515,00	5.445.994.235,00	3.444.994.592,00	3.277.881.944,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TANGGAL
KASUBAG/	<i>[Signature]</i>	19/6
KASUBID		
KASUBD		
SEKRETARIS		
KETUA APARAN		
KEBUN		
SEKRETARIS DAERAH		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	PARAF	TGL.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>	
KABAG.	<i>[Signature]</i>	


BUPATI KUNINGAN
[Signature]
ACEP PURNAMA